

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara kepulauan besar yang memiliki letak geografis strategis dengan keberagaman sumber daya di tiap wilayah yang terdiri dari pemerintah kabupaten/kota dan desa. Setelah adanya perubahan sistem pemerintahan dari tersentralisasi menjadi desentralisasi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan di tiap daerah. Desentralisasi adalah suatu bentuk pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri urusan di tiap daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat tercapainya pembangunan yang merata di tiap daerah di Indonesia dengan diimplementasikannya otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah suatu bentuk upaya pelaksanaan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengurus secara mandiri kepentingan daerah otonom dan masyarakatnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Adanya otonomi daerah bertujuan agar dapat meningkatkan kontribusi pemerintah sebagai bentuk upaya memaksimalkan pemberian pelayanan publik dan mengikutsertakan masyarakat dalam memaksimalkan penerimaan asli daerah agar dapat tercapainya kemandirian keuangan di tiap daerah. Kemandirian keuangan merupakan kemampuan daerah dalam memaksimalkan potensi penerimaan asli daerah yang dapat mendanai kebutuhan di tiap daerahnya sendiri dengan tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber penerimaan dan pengeluaran berbeda sehingga dapat mendorong timbulnya kesenjangan antar daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk bisa mengatasi kesenjangan antar daerah tersebut dengan melalui kebijakan dana transfer berupa dana perimbangan. Akan tetapi, hal tersebut memunculkan fenomena baru yang terjadi pada pemerintah di tiap daerah yakni adanya kecenderungan daerah menggunakan dana perimbangan untuk mendanai kebutuhan daerah dan kurang memaksimalkan potensi daerahnya

sendiri sehingga adanya *flypaper effect* di beberapa daerah di Indonesia (Wahyuni & Supheni, 2017). Dewasa ini pemerintah daerah dalam mengelola keuangan didorong untuk dapat mendanai sendiri kebutuhan daerah dengan memaksimalkan potensi penerimaan di tiap daerah agar dapat tercapainya kemandirian keuangan.

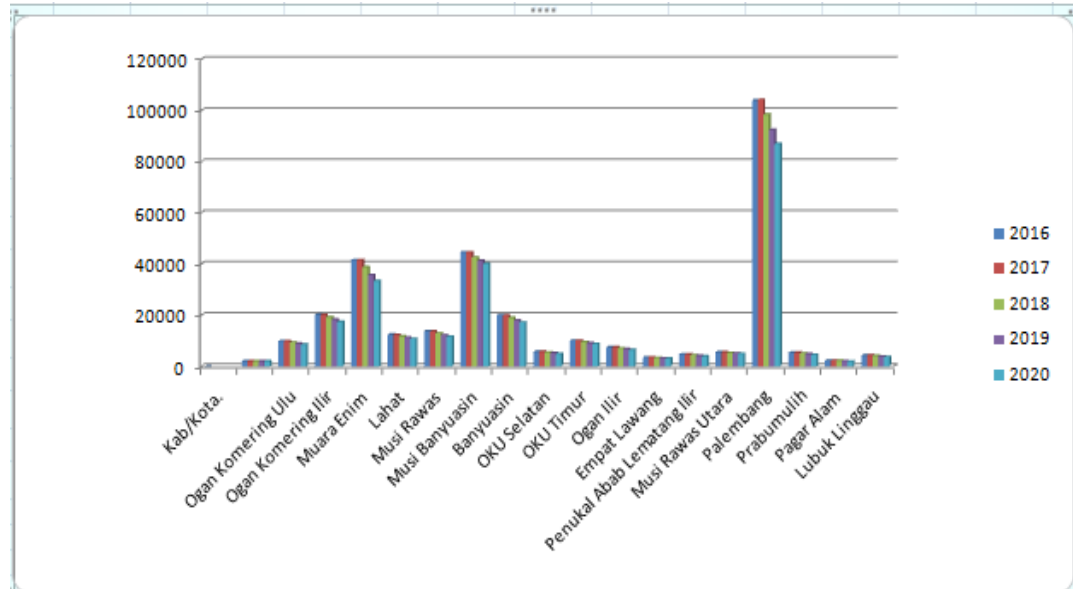
Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan daerah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas dan kemampuan suatu daerah penyelenggara otonomi daerah. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Ayu dkk, 2020).

Pembangunan daerah adalah suatu bentuk upaya pemerintah agar dapat tercapainya pemerataan pelayanan publik di tiap daerah dan agar dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi di tiap daerah yang di ukur dengan tingkat barang dan jasa yang di hasilkan oleh suatu daerah (Sari dkk, 2019).

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu bentuk adanya perkembangan menuju kearah perbaikan suatu perekonomian di suatu daerah yang terjadi secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perumbuhan ekonomi suatu Negara di ukur dengan tingkat Produk Domestik Bruto dan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah provinsi di ukur dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (Sari dkk, 2019).

Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia tahun 2020 sebesar Rp15.434,20 triliun atau U\$3.99,7 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 2,07% dari tahun sebelumnya ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Pertumbuhan perekonomian pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada gambar 1.1.

Berikut pertumbuhan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:



Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), Data diolah (2022)

**Gambar 1.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2016-2020 (Milliar Rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, diperoleh jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020 adanya ketidakmerataan antar daerah. Terdapat kabupaten dan kota yang PDRB nya mengalami kenaikan namun ada beberapa diantaranya mengalami penurunan seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Prabumulih, Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Dari tahun 2019 ke 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami penurunan sebesar 1,01, selanjutnya Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 15,74, Kota Prabumulih mengalami penurunan pada tahun 2019 ke 2020 sebesar 9,54 serta Kota Palembang juga mengalami penurunan pada tahun 2019 ke 2020 sebesar 265,1 dan Kota Lubuk Linggau mengalami penurunan pada tahun 2019 ke 2020 sebesar 65,63.

Kota Palembang memiliki Produk Domestik Regional Bruto jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan yang mana sebagai pusat perekonomian dengan

pembangunan infrastruktur yang cenderung cepat menjadi pemacu pergerakan perekonomian secara luas di kota Palembang.

Tingkat Produk Domestik Regional Bruto di tiap daerah kabupaten/kota dari tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan yang tidak pasti per tahunnya dimana menunjukkan jika belum mampunya pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memaksimalkan potensi penerimaan daerah dalam mendanai kebutuhan daerahnya. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, setiap daerah menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam perencanaan pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan ekonomi di tiap daerah.

Upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari segi keuangan daerah maka diperlukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah yang berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang diharapkan akan menggambarkan sejauh mana kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Analisis rasio keuangan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio derajat desentralisasi fiskal.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya transfer pemerintah pusat, provinsi ataupun dari pinjaman daerah. Dengan mengetahui tingkat kemandirian keuangan suatu daerah maka dapat menunjukkan seberapa mampu daerah tersebut untuk membiayai keperluan daerahnya sendiri.

Efektivitas PAD ialah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Dengan demikian rasio efektivitas dapat membantu menilai seberapa efektifnya kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan PAD terhadap pencapaian target yang telah di tetapkan berdasarkan potensi daerah.

Sementara derajat desentralisasi fiskal menunjukkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan yang diterima dalam hal pendanaan pembangunan suatu daerah dan untuk menunjukkan tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Peneliti memilih ketiga variabel rasio keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang memfokuskan kepada penerimaan asli daerahnya yang di mana pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan PDRB sebagai alat untuk melihat perkembangan kondisi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penggunaan tolak ukur tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menunjukkan masih adanya perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari dkk, 2019) yang mengungkapkan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh (Kumpangpune dkk, 2019) mengungkapkan rasio kemandirian daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian terkait rasio efektivitas PAD yang dilakukan oleh (Sari dkk, 2019) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fatmawati, 2021) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian terkait dengan rasio derajat desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh (Sutriani & Damanik, 2022) menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rinova & Dewi, 2021) yang menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan**

## **Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di jelaskan dapat di tarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya agar penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti membatasi permasalahan dengan memfokuskan pada pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio derajat desentralisasi fiskal, terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Penelitian ini menggunakan informasi yang di lihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *audited*.
3. Penelitian ini di lakukan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Penelitian ini hanya menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *audited* untuk periode 2016-2020.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk penerapan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan keuangan daerah dan menambah wawasan bagi peneliti mengenai rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio derajat desentralisasi fiskal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Bagi akademik, sebagai bahan bacaan atau studi pustaka yang dapat bermanfaat di masa yang akan datang, juga dapat digunakan sebagai referensi dalam memberikan informasi-informasi tambahan kepada peneliti selanjutnya.